



DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng

# LAPORAN KINERJA (LKJ) 2025

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH



dp3ap2kb\_jateng



dp3ap2kbjateng



@dp3ap2kb\_jateng



**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIS DINAS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	7
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	22
B Rekomendasi .....	22

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	11
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 .....	12
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD ..	13
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....	14
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	16
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .....	17
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SEKRETARIS**

**WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19780919 200604 2 003

### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

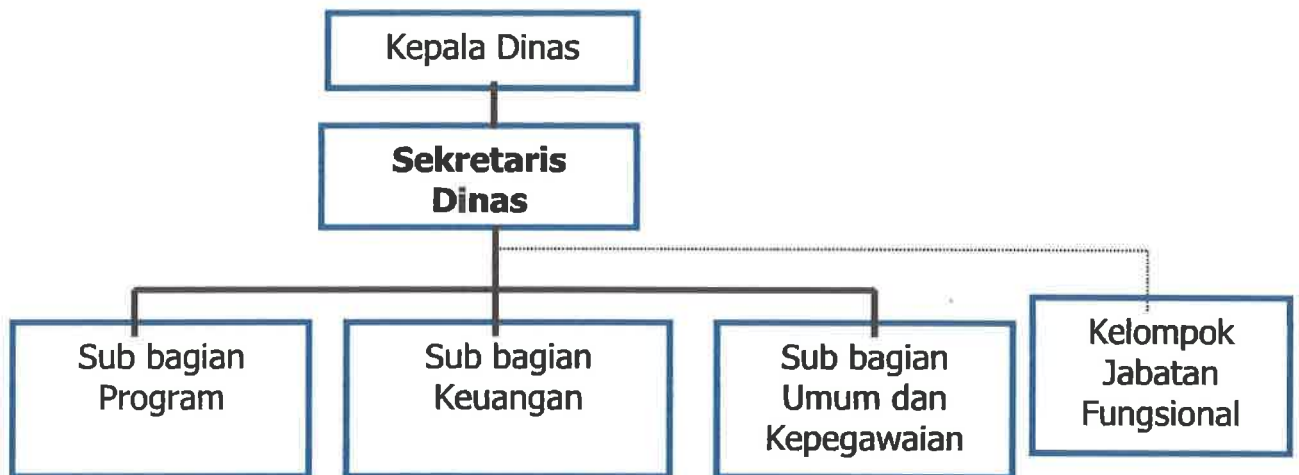
Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi Pendataan dan informasi di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dinas**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Susunan Organisasi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Sub bagian Program;
- b. Sub bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

## 1.3. Isu Strategis

1. Belum optimalnya pelayanan Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data pilah gender dan anak pada aplikasi SIGA Jateng.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;
3. Mengukur ketersediaan data pilah gender dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIGA JATENG.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat tepat waktu dan semakin berkualitas;
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf dan memotivasi secara berkelanjutan agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan tepat waktu;
3. Memastikan tersedianya data pilah gender yang lengkap, akurat, dan mutakhir dari seluruh Kabupaten/Kota sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender di Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Target Akhir RPJMD</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kepegawaian, keuangan dan perangkat daerah tingkat umum, dan perangkat daerah	90%	90%	100%	90%
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah tingkat	50%	50%	100%	70%
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30%	37,14%	123,8%	35%

**Tabel 3.1.1.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kepegawaian, keuangan daerah tingkat umum, dan perangkat daerah	90%	90%	100%	Baik	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah tingkat kinerja	50%	50%	100%	Baik	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30%	37,14%	123,8%	Isitimewa	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	-	-	-	45%	45%	100%	50%	50%	100%
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi	-	-	-	25%	25,71%	102,84%	30%	37,14%	123,8%

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		pada aplikasi sistem informasi gender dan anak										

**Tabel 3.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	45%	70%	64,29%
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	25,71%	35%	73,46%

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%		
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	50%	50%	100%		
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30%	37,14%	123,8%	Beberapa Kabupaten/Kota sudah memiliki komitmen dalam penyediaan	

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						data pilah gender	

**Tabel 3.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	90%	90%	100	15.615.300.000	13.812.241.933	88,45	11,55
		50%	50%	100				
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	30%	37,14%	123,8	89.590.000	86.811.348	96,9	3,1

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	
				Administrasi Barang Milik	Jumlah jenis dokumen	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Daerah pada Perangkat Daerah	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit barang milik daerah	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	123,8	Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	pemeliharaan  Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	100	Menunjang

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Program Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.615.300.000	13.812.241.933	88,45
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	89.590.000	86.811.348	96,9
	<b>Total</b>	<b>15.704.890.000</b>	<b>13.899.053.281</b>	<b>88,5</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam kategori **Baik**. Hal ini dikarenakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp.1.805.836.719 atau sebesar 11,5%. Adapun ketidakterserapan tersebut pada anggaran Belanja Pegawai dan Honor Pengelola Keuangan karena alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara periodik, khususnya pada belanja rutin, sebagai bagian dari pengendalian internal;
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan kepegawaian, guna mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis;

- Evaluasi Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penetapan target kinerja Tahun 2026, agar capaian kinerja yang tinggi dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Dra. ENA RACHMAWATI, M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

**SEKRETARIS**

**WUSANI SETYANINGSIH, SE,M.Si**

Pembina

NIP. 19780919 200604 2 003



**LAPORAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	9
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	16
2.4 Kinerja Keuangan.....	19
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	21
B Rekomendasi .....	21

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025 .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**AHMAD HAEKAL, S.Kom, MM**

Penata Tingkat I

NIP. 19850202 201001 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



**Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023**

### **1.3. Isu Strategis**

1. Belum optimalnya pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - g. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

## **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut yaitu dengan meningkatkan koordinasi internal dan eksternal pada bidang kepegawaian, Organisasi, Humas ketatalaksanaan, Rumah tangga serta asset sehingga dapat meningkatkan pelayanan baik internal maupun eksternal Dinas

## **2.3 Analisis Kinerja**

### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Istimewa : > 100%
- b. Baik : 80,01% – 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% – 80%;
- d. Kurang : 20,01% – 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
	2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%	90%	100
	1. Sosialisasi Peraturan	Terlaksananya sosialisasi	Jumlah orang yang	30orang	50 orang	166,6667

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Perundang-Undangan	peraturan perundang-undangan	mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	90%	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100
	7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit	2 Unit	100
	1. Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 unit	4 unit	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	100
	2. Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	1 unit	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	2 unit	2 unit	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya	dipelihara/direhabilitasi			
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	6 unit	100

**Tabel 2.2.b**  
**Capaian Kinerja Kegiatan**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 dok	0	0	0	1	100
2	Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan	90%	10	35	60	90	100

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan						
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	10	35	60	90	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 unit	0	0	0	2	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 laporan	0	0	0	1	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 unit	2	1	1	0	100

Berdasarkan tabel 2.2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Baik**". Hal ini dikarenakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat pada akhir tahun.

### **2.3.2. Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan administrasi umum setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.  
Formulasi : Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya administrasi umum sesuai target
  - d. Hambatan:  
Belum optimalnya administrasi umum PD
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan administrasi umum PD
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan administrasi barang milik daerah setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.  
Formulasi : Total dari seluruh jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya administrasi barang milik daerah sesuai target

- d. Hambatan:  
Belum optimalnya administrasi barang milik daerah
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan administrasi barang milik daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan administrasi kepegawaian setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Formulasi : Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya administrasi kepegawaian PD
  - d. Hambatan:  
Belum optimalnya administrasi kepegawaian PD
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan administrasi kepegawaian PD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan administrasi kepegawaian setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Formulasi : Jumlah total barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD sesuai target
  - d. Hambatan:  
Belum optimalnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD
  - e. Tindaklanjut:

Meningkatkan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan PD

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Formulasi : Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan PD sesuai target
  - d. Hambatan:  
Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan PD
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan PD
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah setiap bulannya.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Formulasi : Jumlah total unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai target
  - d. Hambatan:  
Belum optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.3.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.742.000	191.242.260	99,73
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.862.000	61.763.490	99,84
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.546.000	37.524.000	99,94
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	12.000.000	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.556.930.000	1.536.524.276	98,69
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.612.000	372.739.908	97,68
	<b>TOTAL</b>	<b>2.241.692.000</b>	<b>2.211.793.934</b>	<b>99,31</b>

Berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,31%. Hal ini menunjukkan bahwa

Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 29.898.066,- atau 1,35%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi anggaran.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Baik**. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana tersaji pada tabel 2.2b merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulannya. Dan berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 kategori baik dengan SILPA sebesar 29.898.066,- atau 1,35%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan efisiensi Anggaran

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai;

2. Konsolidasi intensif dengan Stakeholder terkait yang berhubungan terhadap kebijakan pada bidang Umum dan Kepegawaian.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**SEKRETARIS DINAS**



**WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19780919 200604 2 003

**KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



**AHMAD HAEKAL, S.Kom, MM**

Penata Tingkat I

NIP. 19850202 201001 1 002



**LAPORAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	9
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	13
2.4 Kinerja Keuangan.....	14
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	16
B Rekomendasi .....	16

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Kepala Sub Bagian Program Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Program Tahun 2025 .....	11
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Program Tahun 2025 .....	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM**



**RAGIL WILANTUKO, SE, M.MKMT**

Penata Tingkat I

NIP. 19851226 201101 1 004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
- c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program;
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **1.2. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Sub Bagian Program  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023*

### **1.3. Isu Strategis**

1. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 2025 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat tepat waktu dan semakin berkualitas.
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf dan memotivasi secara berkelanjutan agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

#### **2.3 Analisis Kinerja**

##### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Istimewa : > 100%
- b. Baik : 80,01% – 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% – 80%;
- d. Kurang : 20,01% – 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50%	50%	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	2 dokumen	200
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3 laporan	100
2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang difasilitasi SIGA	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12%	22,85%	190,41
	1. Penyediaan Data Gender	Meningkatnya ketersediaan	Jumlah Dokumen Data	3	3 dokumen	100

dan Anak Provinsi	dokumen data gender dan anak	Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	dokumen
-------------------	------------------------------	--	---------

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Program**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian %
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50%	10	30	40	50	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	0	0	2	2	200
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	3	3	3	3	100
2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12%	11,4	5,71	14,28	22,85	100



Berdasarkan tabel 2.2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan telah tercapai jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi telah dibuat pada awal tahun.

### **2.3.2. Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Kegiatan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya jumlah kebutuhan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun  
Formulasi : (Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun) x 100%
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:  
Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi tercapai sesuai target.
  - d. Hambatan:  
Belum maksimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah
  - e. Tindakanjant:  
Meningkatkan perencanaan dan evaluasi PD
2. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA  
Formulasi : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan pengimplementasian aplikasi SIGA JATENG dibagi 35 dikali 100
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:

Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi tercapai sesuai target.

d. Hambatan:

Belum maksimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah

e. Tindaklanjut:

Meningkatkan perencanaan dan evaluasi PD

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebahai berikut:

**Tabel. 2.3**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan**  
**Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.195.000	139.042.389	98,48
2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	89.590.000	86.811.348	96,90
	<b>TOTAL</b>	<b>230.785.000</b>	<b>225.853.737</b>	<b>97,69</b>

Berdasarkan tabel 2.3, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Istimewa meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 4.931.263,- atau 2,31%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi anggaran.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimwa**. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi sebagaimana tersaji pada tabel 2.2b merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam 1 tahun. Dan berdasarkan tabel 2.3, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 4.931.263,- atau 2,31%. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan :

1. Efisiensi anggaran.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dan relevan dengan sasaran pada Renstra perangkat daerah dan RKPD;

2. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**SEKRETARIS DINAS**

  
**WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19780919 200604 2 003

**KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM**

  
**RAGIL WILANTUKA, SE, M.MKMT**

Penata Tingkat I

NIP. 19851226 201101 1 004



**LAPORAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	13
2.4 Kinerja Keuangan.....	13
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	15
B Rekomendasi .....	15

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2025 .....	12
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan Tahun 2025 .....	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  
**NURUL HUSNA LISTYATI, SE.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19720811 199703 2 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Sub Bagian Keuangan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023

### **1.3. Isu Strategis**

1. Belum optimalnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup Kegiatan dan beberapa sub kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja keuangan perangkat daerah sehingga dapat tepat waktu dan semakin berkualitas.
2. Melakukan pengawasan melekat pada staf dan memotivasi secara berkelanjutan agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

## **2.3 Analisis Kinerja**

### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Istimewa : > 100%
- b. Baik : 80,01% – 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% – 80%;
- d. Kurang : 20,01% – 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	61 orang	61 orang	100
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
	4. Koordinasi dan	Tersedianya laporan	Jumlah laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah			
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	90%	100
	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100
	2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	100

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian %
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	10%	35%	60%	90%	100

Berdasarkan tabel 2.2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Baik**". Hal ini dikarenakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan dan laporan pelaksanaan kegiatan keuangan yang dibuat pada akhir tahun.

### **2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Terpenuhinya jumlah laporan dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah.
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun  
Formulasi : Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:
    - Kerjasama dan dukungan dari berbagai bidang.
    - Ketercapaian pelaporan Keuangan sesuai target.
  - d. Hambatan:  
Belum maksimalnya pelaporan keuangan Perangkat Daerah dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Sub Bagian Keuangan.
  - e. Tindaklanjut:  
Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah disertai dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sub Bagian Keuangan.

### **2.4. Kinerja Keuangan**

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebahai berikut:

**Tabel. 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.973.780.000	11.202.803.240	86,35
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.633.000	258.602.370	100
	<b>TOTAL</b>	<b>13.232.413.000</b>	<b>11.461.405.610</b>	<b>93,175</b>

Berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,175% Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 1.771.007.390,- atau 6,82%. Adapun ketidakterserapan tersebut dikarenakan :

1. Silpa pada anggaran Gaji 1.748.388.260, Honor pengelola keuangan 22.500.000 karena Alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong, dll.

## BAB III PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Baik**. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagaimana tersaji pada tabel 2.2b merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulannya. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,175%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 1.771.007.390,- atau 6,82%. Adapun ketidakterserapan tersebut dikarenakan :

1. Silpa pada anggaran Gaji 1.748.388.260, Honor pengelola keuangan 22.500.000 karena Alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong, dll.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;

2. Penambahan Sumber **Daya** Manusia (SDM) yang kompeten.

Mengetahui  
**SEKRETARIS**

  
**WUSANI SETYANINGSIH, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19780919 200604 2 003

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

  
**NURUL HUSNA LISTYATI, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720811 199703 2 006



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR**  
**KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	24
3.3 Inovasi .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	25
B Rekomendasi .....	25

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	11
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 .....	12
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD ..	15
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....	16
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	19
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .....	20
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan .....	24

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**Pt. KEPALA BIDANG KESETARAAN GENDER  
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 200312 2 004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesetaraan Gender;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2 Struktur Jabatan**

Struktur organisasi jabatan bahwa Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

### **Gambar 1.1 Struktur Organisasi**

Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Susunan Organisasi Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Kesetaraan Gender;
- b. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;

Seksi – seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas.

### **1.3 Isu Strategis**

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan;
3. Belum optimalnya perspektif gender dalam perencanaan program baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
4. Terbatasnya sumber daya Kabupaten/Kota dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan secara komprehensif.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup 3 (tiga) Program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga, beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi;
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi;
3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

Adapun PK Perubahan Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dan stakeholter terkait dengan advokasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan;
2. Peningkatan Anggaran Responsif Gender di Provinsi;
3. Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi;
4. Peningkatan jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

#### Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80%	82,86%	103,58%	70%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	31,42%	77,14%	245,51%	50%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20%	22,86%	114,3%	25,71%

**Tabel 3.1.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80%	82,86%	103,58%	Istimewa	DP3AP2KB Provinsi dan Kab/Kota
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	31,42%	77,14%	245,51%	Istimewa	DP3AP2KB Provinsi dan Kab/Kota
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan	20%	22,86%	114,3%	Istimewa	DP3AP2KB Provinsi dan Kab/Kota

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		kuualitas keluarga terstandar					

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengarusutan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas	-	-	-	60%	80%	133,33 %	80%	82,86 %	103,58%

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan											
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	-	-	-	11%	28,57 %	259,73 %	31,42%	77,14 %	245,51%		

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	-	-	-	14,29%	22,86 %	159,97 %	20%	22,86 %	114,3%

**Tabel 3.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target Akhir 2026</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80%	70%	114,28%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	28,57%	50%	57,14%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22,86%	25,71%	88,91%

**Tabel 3.1.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80%	82,86%	103,58%		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	31,42%	77,14%	245,51%	Adanya amanat pusat untuk pembentukan UPTD PPA dalam memenuhi mandat UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20%	22,86%	114,3%	Adanya kebijakan untuk standarisasi Puspaga dari	

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						Kementerian PPPA	

**Tabel 3.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	80%	82,86%	103,58	990.325.000	985.387.656	99,50	0,5
2	Program Perlindungan Perempuan	31,42%	77,14%	245,51	1.301.251.000	1.276.991.369	98,14	1,86
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20%	22,86%	114,3	33.026.000	32.934.000	99,72	0.28

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	103,58	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	148,09	Menunjang
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	Persentase perempuan yang mengikuti	106,66	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	245,51	Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkatkan pemahaman ya	101,5	Menunjang
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan		

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Penguatan dan Pengembangan Layanan Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	100	Menunjang
3	Program Peningkatan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan	114,3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Kualitas Keluarga	layanan kualitas keluarga terstandar		dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak		

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Program Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	990.325.000	985.387.656	99,50
2	Program Perlindungan Perempuan	1.301.251.000	1.276.991.369	98,14
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	33.026.000	32.934.000	99,72
	<b>TOTAL</b>	<b>2.324.602.000</b>	<b>2.295.313.025</b>	<b>99,12</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### 3.3. Inovasi

#### 1. SERAT KARTINI

Program Serat Kartini bertujuan mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran komunitas sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorong kebijakan pemerintah dari level bawah hingga tingkat atas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Kesetaraan Gender dan Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimewa**. Hal ini dikarenakan pada Program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Program Kesetaraan Gender dan Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,12%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 29.288.975 atau sebesar 1,26%. Adapun ketidakterserapan tersebut dikarenakan alokasi anggaran honorarium narasumber untuk kegiatan BKOW tidak terserap dan terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang pembangunan;
2. Peningkatan kapasitas, ketrampilan dan akses ekonomi serta pemasaran bagi perempuan wirausaha;
3. Peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik serta dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
4. Mendorong implementasi kebijakan undang-undang TPKS, Perda, Pergub maupun kebijakan perlindungan perempuan dan anak ditingkat Kab/Kota.

Semarang, 12 Januari 2025

Mengetahui

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Pit. KEPALA BIDANG KESETARAAN  
GENDER DAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN**

**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004



**LAPORAN KINERJA  
SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	7
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	8
2.3.1 Capaian Kinerja.....	8
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	16
2.4 Kinerja Keuangan.....	18
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	19
B Rekomendasi .....	19

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Tahun 2025 .....	18

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Perlindungan Perempuan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Perlindungan Perempuan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pengendalian penduduk sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN**



**ASTERIA DEWI RUSRINAWATI, S.Psi, M.Pd**

Pembina

NIP. 19720814 199901 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Jabatan**

Seksi Perlindungan Perempuan pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Perlindungan Perempuan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan;
4. menyiapkan bahan advokasi kebijakan teknis perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
5. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang tingkat Daerah;
6. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang antar Provinsi, lembaga tingkat Pusat, pihak terkait tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
7. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
8. menyiapkan bahan advokasi perlindungan perempuan kelompok rentan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
9. menyiapkan layanan pengaduan/laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan; dan
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Struktur Jabatan

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 Tahun 2023

## 1.3 Isu Strategis

1. Kuatnya budaya patriarki yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
2. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus KDRT dan kekerasan seksual;
3. Kekerasan berbasis gender online/KBGO dan bullying anak semakin meningkat.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
  - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
  - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Advokasi ke kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan sesuai dengan isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
2. Penyusunan rencana kegiatan dalam hal pengembangan lembaga layanan.

#### **2.3 Analisis Kinerja**

##### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Koordinator Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Perlindungan Perempuan**  
**Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Pencegahan kekerasan pada perempuan	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	52%	52,78%	101,5
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Dok.	6 Dok.	150%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					
	2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya dan pelaksanaan program pencegahan terhadap koordinasi sinkronisasi kebijakan, kegiatan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 OPD	1 OPD	100
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya lembaga perlindungan yang ditingkatkan kualitas layanan perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	12 Kelompok	12 Kelompok	100
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	Meningkatnya yang penyediaan prasarana layanan bagi kab/kota didampingi sarana bagi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan	1 Dok.	1 Dok.	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	perempuan	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pemahaman peserta lembaga penyedia layanan kekerasan pada perempuan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	15 Orang	150
3.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kegiatan bagi perempuan dalam situasi darurat	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	25 Orang	25 Orang	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya yang penyediaan prasarana layanan perempuan kab/kota didampingi sarana bagi perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok.	2 Dok.	100

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Perlindungan Perempuan**  
**Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	52%	44,44%	47,2%	50%	52,78%	101,5
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	12 Kelompok	5 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok	0 Kelompok	100

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "Istimewa". Hal ini dikarenakan adanya sinergitas kerja antara DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah serta mitra dan unsur pentahelix.

### 2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan

Pencapaian kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:

Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan
  - b. Indikator Kegiatan:

Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan

Formulasi: Jumlah Pemda yang mempunyai Perda Perlindungan Perempuan dibagi 35 Kab/Kota dikalikan 100 persen
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:
    - 1) Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dan organisasi;
    - 2) Peningkatan kesadaran dan Partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan;
    - 3) Pemberdayaan korban dan kelompok rentan
    - 4) Pengalokasian sumber daya yang memadai
    - 5) Pengembangan sistem dukungan dan layanan bagi korban
    - 6) Penelitian dan analisis data untuk memahami akar masalah kekerasan
    - 7) Pengembangan kebijakan dan program yang efektif dan berkelanjutan
  - d. Hambatan:
    - 1) Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga
    - 2) Keterbatasan sumber daya (dana, SDM, infrastruktur)
    - 3) Kesadaran masyarakat yang masih rendah
    - 4) Ketakutan atau stigma terhadap pelaporan kekerasan
    - 5) Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang kekerasan
    - 6) Keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
    - 7) Keterbatasan akses ke layanan dan dukungan bagi korban
    - 8) Budaya dan norma sosial yang masih mendukung kekerasan
    - 9) Lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku kekerasan
  - e. Tindak lanjut:
    - 1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga
    - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye
    - 3) Meningkatkan akses ke layanan dan dukungan bagi korban

- 4) Mengadvokasi kebijakan dan program yang mendukung perlindungan perempuan
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
  - 6) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pencegahan kekerasan
  - 7) Mengintegrasikan pencegahan kekerasan dengan bersinergi bersama Pentahelix
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi:
- a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya  
Formulasi: Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:
    - 1) Komitmen kuat dari pimpinan lembaga
    - 2) Sumber daya yang memadai (dana, SDM, infrastruktur)
    - 3) Standar layanan yang jelas dan terukur
    - 4) Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan
    - 5) Kolaborasi dan koordinasi yang efektif dengan lembaga lainnya
    - 6) Partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan perempuan
    - 7) Adanya Kebijakan yang mendukung program perlindungan perempuan
  - d. Hambatan:
    - 1) Keterbatasan jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber daya manusia dalam lembaga layanan
    - 2) Mutasi bagi petugas di Lembaga layanan dan tidak ada transfer ilmu kepada petugas yang baru
  - e. Tindak lanjut:
    - 1) Mengembangkan rencana strategis yang jelas dan terukur
    - 2) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas
    - 3) Meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi
    - 4) Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga lain
    - 5) Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala
    - 6) Mengembangkan jaringan atau Kerjasama dengan Lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92.968.000	90.813.000	97,68
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.208.283.000	1.186.178.369	98,17
	<b>Total</b>	<b>1.301.251.000</b>	<b>1.276.991.369</b>	<b>98,14</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, yang artinya dapat mencapai target yang direncanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang dimiliki (man, money dan methods).

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sub kegiatan dapat dikategorikan "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan pada Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b diimplementasikan selaras dengan perencanaan yang telah dibuat dan terjaga kontinuitasnya diselaraskan dengan update issue terpenting di setiap focus dan lokus kegiatan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 98,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Sub Koordinator Perlindungan Perempuan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antara stakeholder, pemerintah dan lembaga non pemerintah ditingkat pusat, provinsi, Kab/Kota maupun antar provinsi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan;
2. Mendorong sinergisitas program dan kegiatan antar lembaga dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
3. Mendorong Komunikasi, Infomasi dan Edukasi tentang perlindungan perempuan.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui

**Pit. KEPALA BIDANG KESETARAAN  
GENDER DAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 200312 2 004

**SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN**



**ASTERIA DEWI RUSRINAWATI, S.Psi, M.Pd**

Pembina

NIP. 19720814 199901 2 001



**LAPORAN KINERJA  
SUB KOORDINATOR KESETARAAN GENDER  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	7
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	15
2.4 Kinerja Keuangan.....	18
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	20
B Rekomendasi .....	20

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Kesetaraan Gender Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Tahun 2025 .....	18

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Kesetaraan Gender pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Kesetaraan Gender pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pengendalian penduduk sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
KESETARAAN GENDER**



**MELATI DIAH PAMUNGKAS, SE, MM**

Penata Tingkat I

NIP. 19850516 200901 2 010

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Jabatan**

Seksi Kesetaraan Gender pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Kesetaraan Gender;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
3. menyiapkan bahan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
4. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Kesetaraan Gender;
5. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah tingkat Daerah;
6. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pengintegrasian gender pada Lembaga Pemerintah tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
7. menyiapkan bahan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota; dan
8. menyiapkan bahan pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
9. menyiapkan bahan bantuan teknis pemberdayaan perempuan di Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan Sosial tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
10. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender lintas Kabupaten/Kota;
11. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi kebijakan, serta pendampingan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesetaraan Gender; dan
13. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Struktur Jabatan

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Kesetaraan Gender  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 Tahun 2023

## 1.3 Isu Strategis

1. Masih adanya kesenjangan gender dibidang politik dan ekonomi;
2. Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG di Kabupaten/Kota;
3. Masih rendahnya proporsi anggaran responsif gender dibanding dengan jumlah belanja operasi dan modal.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
  - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
  - c. Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
  - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi PUG tingkat Provinsi;
2. Melaksanakan verifikasi dokumen PPRG;
3. Melaksanakan sosialisasi PUG bersama garpu perak;
4. Melaksanakan pelatihan PUG bagi OPD Provinsi;
5. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan PUG bagi kab/kota;

6. Menyelenggarakan advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik dan ekonomi;
7. Penguatan keterlibatan perempuan bidang politik dan ekonomi;
8. Pelaksanaan (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) keluarga yang responsif gender dan hak anak.

## **2.3 Analisis Kinerja**

### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Koordinator Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Kesetaraan Gender**  
**Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	11%	16,29%	148,09
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	2 Laporan	3 Laporan	150
	2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Dokumen	50 Dokumen	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	25 Orang	50 Orang	200
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pemahaman perempuan dalam bidang politik dan ekonomi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	75%	80%	106,66
1.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan politik	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/du nia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum,	1330 orang	1330 orang	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
			sosial dan ekonomi			
	2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kesejahteraan perempuan rentan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Kelompok	3 Kelompok	100
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya layanan keluarga yang responsif gender dan anak	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100%	100%	100
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pewjudan KG dan perlindungan anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk	6 OPD	6 OPD	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Kesetaraan Gender**  
**Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	11%	10,37	10,37	16,29	16,29	148,09

2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	75%	78	78	78	80	106,66
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "Istimewa". Hal ini dikarenakan adanya sinergitas kerja antara DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah serta mitra dan unsur pentahelix.

### **2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian kegiatan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:  
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada OPD Provinsi didukung oleh adanya komitmen Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD dalam mendorong implementasi PUG, termasuk penganggaran yang responsif gender. Selain itu, telah tersedianya regulasi dan kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan PUG menjadi landasan yang kuat dalam implementasi di tingkat perangkat daerah. Dukungan kelembagaan melalui Pokja PUG, focal point gender di OPD, serta peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) juga menjadi faktor penting
  - d. Hambatan:  
Pelaksanaan PUG masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum meratanya pemahaman dan kapasitas SDM di OPD terkait konsep dan implementasi ARG. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa PUG merupakan tanggung jawab sektor tertentu saja, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh program dan kegiatan OPD. Ketersediaan data terpilah gender yang belum lengkap dan belum terintegrasi juga menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan berbasis gender. Di sisi lain, keterbatasan waktu dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menyebabkan kualitas ARG di beberapa OPD belum optimal
  - e. Tindak lanjut:  
Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan komitmen pimpinan OPD melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor agar PUG menjadi bagian integral mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, coaching, dan pendampingan teknis penyusunan analisis gender. Selain itu, perlu mendorong penguatan sistem data terpilah gender yang terintegrasi antar OPD untuk mendukung perencanaan berbasis eviden. Optimalisasi peran pokja PUG dan

focal point di OPD juga perlu ditingkatkan agar fungsi koordinasi dan monitoring berjalan efektif. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARG secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan implementasi PUG di tingkat OPD.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:

Meningkatnya pemahaman perempuan dalam bidang politik dan ekonomi
  - b. Indikator Kegiatan:

Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan perempuan pada organisasi masyarakat didukung oleh tingginya partisipasi dan antusiasme perempuan dalam mengikuti kegiatan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Dukungan dari organisasi dan Lembaga masyarakat sebagai mitra strategis juga berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan peserta, seperti peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, literasi politik, serta penguatan keterampilan ekonomi produktif. Kehadiran narasumber yang kompeten serta metode pelatihan yang interaktif turut meningkatkan pemahaman peserta. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan kegiatan
  - d. Hambatan:

Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu dan kesempatan perempuan untuk mengikuti kegiatan secara optimal, yang disebabkan oleh masih dominannya peran domestik. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan dan literasi peserta memengaruhi daya tangkap terhadap materi yang disampaikan. Di sisi lain, norma sosial dan budaya yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan turut memengaruhi tingkat kepercayaan diri dan keterlibatan aktif peserta. Kurangnya komitmen dalam menjaga keberlanjutan kegiatan juga berdampak pada stagnasi perkembangan kapasitas peserta
  - e. Tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan perluasan jangkauan kegiatan melalui kolaborasi yang lebih intensif dengan organisasi masyarakat, OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan kapasitas peserta perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan, mentoring, dan pendampingan, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi produktif. Upaya

penguatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran perempuan dalam pembangunan juga perlu ditingkatkan guna mengurangi hambatan sosial budaya. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengukur peningkatan pemahaman serta dampak kegiatan terhadap pemberdayaan perempuan.

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi:

a. Sasaran Strategi Kegiatan:

Meningkatnya layanan keluarga yang responsif gender dan anak

b. Indikator Kegiatan:

Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak

c. Faktor yang mendukung keberhasilan:

Keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas keluarga didukung oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ketahanan keluarga yang responsif gender dan hak anak. Dukungan kelembagaan melalui sinergi lintas sektor, seperti OPD terkait, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat, turut memperluas jangkauan layanan kepada keluarga. Ketersediaan tenaga layanan yang memiliki kapasitas dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan konseling juga menjadi faktor penting. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola asuh yang responsif gender dan ramah anak serta tersedianya media edukasi yang mudah diakses turut mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan

d. Hambatan:

Pelaksanaan kegiatan masih menghadapi hambatan berupa belum meratanya pemahaman keluarga mengenai pola asuh yang responsif gender dan pemenuhan hak anak. Keterbatasan akses terhadap layanan, khususnya di wilayah tertentu, juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh sasaran. Selain itu, masih kuatnya pola asuh tradisional yang belum sepenuhnya memperhatikan kesetaraan gender dan kepentingan terbaik bagi anak turut mempengaruhi efektivitas intervensi. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga layanan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

e. Tindak lanjut:

Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga layanan melalui pelatihan berkelanjutan terkait edukasi, konsultasi, dan konseling yang responsif gender dan anak. Perluasan akses layanan melalui penguatan jejaring lintas sektor dan pemanfaatan layanan berbasis digital juga perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong perubahan pola asuh menuju keluarga yang setara dan ramah

anak. Penguatan sistem data dan informasi layanan keluarga secara terintegrasi juga diperlukan untuk mendukung perencanaan dan monitoring yang lebih efektif. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan guna memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada keluarga

#### 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Seksi Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Kesetaraan Gender**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	42.968.000	42.850.000	99,73
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	947.357.000	942.537.656	99,49
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	33.026.000	32.934.000	99,72
	<b>Total</b>	<b>1.023.351.000</b>	<b>1.018.321.656</b>	<b>99,64</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Kegiatan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,64%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Seksi Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, yang artinya dapat mencapai target yang direncanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang dimiliki (man, money dan methods).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sub kegiatan dapat dikategorikan "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan pada Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b diimplementasikan selaras dengan perencanaan yang telah dibuat dan terjaga kontinuitasnya diselaraskan dengan update issue terpenting di setiap focus dan lokus kegiatan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,64%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 5.029.344,-

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Kesetaraan Gender Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan tata kelola dilakukan melalui peningkatan komitmen pimpinan, optimalisasi peran Pokja PUG dan focal point, serta penguatan data terpilah gender guna mendukung pengintegrasian PUG di seluruh bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan capaian IPG dan menurunkan angka IKG;
2. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan ekonomi bagi perempuan (terutama kelompok rentan), serta penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan;

3. Penguatan kualitas keluarga dan kolaborasi lintas sektor melalui perluasan layanan edukasi, konsultasi, dan konseling yang responsif gender dan ramah anak, serta peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan program.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**Plt. KEPALA BIDANG KESETARAAN  
GENDER DAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004

**SUB KOORDINATOR KESETARAAN  
GENDER**



**MELATI DIAN PAMUNGKAS, SE, MM**

Penata Tingkat I  
NIP. 19850516 200901 2 010



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR  
PEMENUHAN HAK  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	22
3.3 Inovasi .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	23
B Rekomendasi .....	23

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	11
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 .....	12
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD ..	14
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....	15
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	17
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .....	18
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan .....	22

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**Pt.KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**DRS. YULI ARSIANTO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680702 199803 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

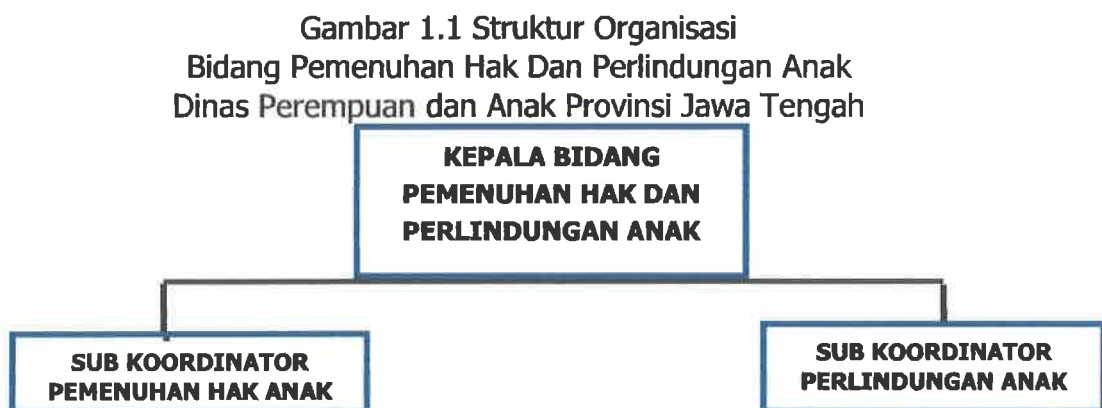
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Anak; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 1.2 Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan bahwa Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Susunan Organisasi Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
- b. Sub Koordinator Perlindungan Anak;

Subagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak.

### **1.3 Isu Strategis**

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator KLA;
2. Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;
3. Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif;
4. Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Meningkatnya Layanan Keluarga yang responsif gender dan anak;
2. Meningkatnya predikat KLA kab/kota;
3. Meningkatnya lembaga KIE Pemenuhan Hak Anak;
4. Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Pencegahan kekerasan pada anak
5. Meningkatnya korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif

Adapun PK Perubahan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaiman terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak;
2. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan dan penguatan Forum Anak tingkat Kecamatan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana berikut berikut :

Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Presentase	
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	22.86	22,86	100 %	25,71
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	82.86	85,71	103,44%	88,57
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk	11.8	9,43	125,13%	11,7

**Tabel 3.1.1.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22.86	22,86	100 %	Baik	DP3AP2KB Provinsi dan Kab/Kota
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82.86	85,71	103,44%	Istimewa	KemenPPA
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11.8	9,43	125,13%	Istimewa	Simfoni PPA

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	-	-	-	14,29	22,86	159,97	22.86	22,86	100
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota	-	-	-	82,85	100%	120,70	82.86	85,71	103,44

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya											
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,36 per 100.000	9,86 per 100.000	125,35	11,50 per 100.000 penduduk	11,15	103,14	11.8	9,43	125,13		

**Tabel 3.1.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target Akhir 2026</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22,86%	25,71%	88,91%
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	100%	88,57%	112,90%
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,15 per 100.000 penduduk	11,7 per 100.000 penduduk	104,93%

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Analisis Keberhasilan /Kegagalan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22.86	22,86	100		
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82.86	85,71	103,44		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11.8	9,43	125,13		

**Tabel 3.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	22.86	22,86	100	60.657.000	60.650.760	99,99	(0,01)
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	82.86	85,71	103,44	596.431.000	596.424.000	100,00	(0,00)
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	11.8	9,43	125,13	203.700.000	203.645.320	99,97	(0,03)

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	100	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100	Menunjang
2.	Program Pemenuhan	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat	103,44	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah Kab/kota yang mengalami	75	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Hak Anak (PHA)	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya		Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	peningkatan predikat KLA		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	125,13	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	116,9591	Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangan lainnya		

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	60.657.000	60.650.760	99,99
2.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	596.431.000	596.424.000	100,00
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	203.700.000	203.645.320	99,97
<b>TOTAL</b>		<b>860.788.000</b>	<b>860.720.080</b>	<b>99,99</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### 3.3. Inovasi

#### 1. JOGO KONCO

JOGO KONCO merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam konteks Jawa Tengah. JOGO KONCO merupakan Gerakan dari anak-anak, khususnya di Jawa Tengah untuk bersama-sama saling menjaga dan melindungi dengan menjadi Pelopor dan Pelapor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimewa**. Hal ini dikarenakan pada program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepada Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 67.920,-

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan lintas sektor terkait dalam keberhasilan program Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak;
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
3. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor dan level;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Pit.KEPALA BIDANG PEMENUHAN  
HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Drs. YULI ARSIANTO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004



**LAPORAN KINERJA PEJABAT  
SUB KOORDINATOR  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	7
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	14
2.4 Kinerja Keuangan.....	15
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	17
B Rekomendasi .....	17

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Tahun 2025 ....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Tahun 2025 .....	12
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Tahun 2025 .....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**



**ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi**

Pembina

NIP. 19830816 200912 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak , bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Perlindungan Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan penguatan sistem perlindungan anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kelompok anak rentan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum tingkat Daerah dan lintas Kabupaten Kota;
- f. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait, tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyiapkan bahan advokasi penanganan anak kebutuhan khusus tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- h. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak tingkat Daerah;
- i. menyiapkan layanan pengaduan/laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak;
- j. menyiapkan layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Anak; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan bahwa Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Perlindungan Khusus Anak  
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023*

## 1.3. Isu Strategis

1. Tingginya jumlah kasus kekerasan anak terutama kasus bullying;
2. Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan anak;
4. Semakin variatifnya kasus kekerasan terutama kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tengah pada tanggal 1 Oktober 2025 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi
  - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  - d. Sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
  - e. Sub kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Melakukan advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat Provinsi maupun Kab/ Kota;
2. Melakukan fasilitasi penguatan dan pengembangan kepada lembaga layanan AMPK.

## **2.3 Analisis Kinerja**

### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Istimewa : > 100%
- b. Baik : 80,01% – 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% – 80%;
- d. Kurang : 20,01% – 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

Adapun capaian kinerja Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Pencegahan kekerasan pada anak	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	34,2%	40%	116,96
	1. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dok.	1 Dok.	100
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dok.	1 Dok.	100
2	Penguatan dan	Meningkatnya lembaga layanan	Jumlah lembaga layanan	15	15 Kelompok	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan anak layanan anak memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan	perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok		
	1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	110 Orang	110 Orang	100
	2. Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Tersedianya bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang	100
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dok.	1 Dok.	100
	4. Penguatan jejaring antar	Meningkatnya Penguatan	Jumlah kegiatan kerjasama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi			
5.	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Tersedianya KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dok.	1 Dok.	100

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	34,2%	34,29%	40%	40%	40%	116,96

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok	0	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan telah tercapai jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi telah dibuat pada awal tahun.

### **2.3.2. Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan oleh Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan  
Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Pencegahan kekerasan pada anak
  - b. Indikator Kegiatan  
Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak  
Formulasi: Jumlah Pemda yang mempunyai Perda Pencegahan Kekerasan pada Anak dibagi Jumlah Pemda dikalikan 100 persen
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan
    - 1) Adanya komitmen pemerintah Kab/ Kota untuk perlindungan anak melalui kebijakan
    - 2) Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak lintas sektor sudah berjalan dengan baik
  - d. Hambatan  
Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak masih bersifat parsial dan belum komprehensif
  - e. Tindaklanjut  
Memperkuat sistem perlindungan anak yang meliputi pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan, melalui RAD perlindungan anak
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:

Meningkatnya lembaga layanan perlindungan anak layanan anak memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan

b. Indikator Kegiatan:

Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya

Formulasi: Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya

c. Faktor Yang mendukung keberhasilan

Sudah terbentuknya UPTD PPA di Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota

d. Hambatan

Terbatasnya ketersediaan anggaran dan SDM penyelenggara perlindungan anak yang terlatih di Provinsi maupun Kab/ Kota sehingga belum optimal

e. Tindaklanjut

Melakukan penguatan dan pengembangan terhadap SDM Lembaga layanan perlindungan anak secara berkelanjutan

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebahai berikut:

**Tabel. 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	76.142.000	76.138.500	99,99
2	Penguatan dan Pengembangan	127.558.000	127.506.820	99,96

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	<b>TOTAL</b>	<b>203.700.000</b>	<b>203.645.320</b>	<b>99,97</b>

Berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 54.680,-.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimewa**. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tersaji pada tabel 2.2b merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam 1 tahun. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 54.680,-.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong implementasi kebijakan undang-undang TPKS, Perda, Pergub maupun kebijakan perlindungan anak ditingkat Kab/Kota;
2. Meningkatkan kerjasama baik stakeholder baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah ditingkat pusat, provinsi, Kab/Kota maupun antar provinsi untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan anak;
3. Mendorong sinergisitas program dan kegiatan antar lembaga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak;
4. Mendorong Komunikasi, Infomasi dan Edukasi tentang perlindungan anak.

Semarang, Januari 2026

Mengetahui

**Pt.KEPALA BIDANG PEMENUHAN  
HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**DRS. YULI ARSIANTO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680702 199803 1 004

**SUB KOORDINATOR  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**



**ISTI ILMA PATRIANI, M.Psi**

Pembina

NIP. 19830816 200912 2 001



**LAPORAN KINERJA  
SUB KOORDINATOR  
PEMENUHAN HAK ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	7
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	14
2.4 Kinerja Keuangan.....	16
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	18
B Rekomendasi .....	18

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025 .....	12
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025 .....	16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....

Halaman  
7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak ) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
PEMENUHAN HAK ANAK**



**ARDIAN/AGIL WASKITO, S.Psi**

Penata Tk. I

NIP. 19880730 201101 1 005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyiapkan bahan pengembangan Daerah dan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- h. menyiapkan bahan advokasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan hak anak lintas Kabupaten/Kota;
- j. menyiapkan layanan konsultasi anak melalui telepon sahabat anak;
- k. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi kebijakan, serta pendampingan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain

## 1.2. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan bahwa Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023*

## 1.3. Isu Strategis

1. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan implementasi pemenuhan hak anak di tingkat Kabupaten/Kota yang dapat ditunjukkan dari capaian hasil evaluasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
2. Masih terbatasnya pelibatan dan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. Penguatan Layanan Kualitas Keluarga yang diwujudkan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) belum sepenuhnya operasional di seluruh 35 Kabupaten/Kota dan belum semuanya dapat terstandarisasi.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tengah pada tanggal 1 Oktober 2025 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi:
  - a. Sub kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - a. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
  - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pendampingan bagi Kabupaten/Kota dalam menghadapi proses evaluasi KLA di tahap Verifikasi Lapangan Hybrid;

2. Advokasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara lintas sektor dalam mendukung upaya peningkatan pemahaman Gugus Tugas KLA dan peningkatan capaian hasil Evaluasi Pengembangan KLA;
3. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak;
4. Identifikasi kebutuhan kepada Kabupaten/Kota untuk dapat mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan keluarga.

## **2.3 Analisis Kinerja**

### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Istimewa : > 100%
- b. Baik : 80,01% – 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% – 80%;
- d. Kurang : 20,01% – 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

Adapun capaian kinerja Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Keluarga yang responsif gender dan anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	100%	100
	1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang terstandar	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	22 Orang	110
2	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 Kab/Kota	3 Kab/kota	75
	1. Advokasi, Sosialisasi dan	meningkatkan jumlah lembaga	Jumlah perangkat daerah	10 OPD	10 OPD	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan PHA	yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi			
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dok.	3 Dok.	150
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya lembaga KIE Pemenuhan Hak Anak	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok	20 Kelompok	100
	1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya peserta KIE pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	Meningkatnya lembaga mitra yang berjejaring tentang	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	peningkatan kualitas keluarga	layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 Kab/Kota	0	0	3	0	75

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok	0	0	20 Kelompok	100

Berdasarkan tabel 2.2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Baik**". Hal ini dikarenakan telah tercapai jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi telah dibuat pada awal tahun.

### **2.3.2. Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Kegiatan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan  
Meningkatnya Layanan Keluarga yang responsif gender dan anak.
  - b. Indikator Kegiatan  
Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak  
Formulasi : Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) dibagi jumlah keluarga yang melakukan konseling dikali 100 persen
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Terdapat komitmen Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan layanan kualitas keluarga di daerah karena menjadi salah satu indikator dalam pengembangan KLA, serta terdapat kebutuhan di masyarakat terhadap ketersediaan layanan pembelajaran kualitas keluarga yang berbasis pemenuhan hak anak bagi orang tua, anak, keluarga dan masyarakat
  - d. Hambatan  
Terbatasnya sumber daya Kabupaten/Kota baik penganggaran dan SDM dalam penyediaan layanan, sedangkan layanan yang sudah ada juga masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pengasuhan secara terus menerus
  - e. Tindaklanjut

- Melakukan advokasi pada pemangku kebijakan lintas sektor di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat secara berkelanjutan untuk mendukung penyediaan layanan keluarga
2. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi.
    - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya predikat KLA kab/kota
    - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA  
Formulasi : Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA
    - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Komitmen Kepala Daerah dan Perangkat Daerah beserta stakeholder terkait dalam mendukung berbagai upaya peningkatan pemenuhan hak anak yang diwujudkan melalui implementasi indikator-indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
    - d. Hambatan  
Belum semua perangkat daerah dan stakeholder terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi memahami serta melakukan upaya implementasi dalam peningkatan capaian indikator-indikator pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
    - e. Tindakan lanjut  
Melakukan advokasi kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan serta melakukan pendampingan yang diperlukan dalam proses evaluasi pengembangan KLA kepada Kabupaten/Kota
  3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.
    - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya lembaga KIE Pemenuhan Hak Anak
    - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE  
Formulasi: Jumlah lembaga masyarakat yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE
    - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:

Adanya kebutuhan peningkatan kapasitas melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada lembaga layanan dan kelompok masyarakat mengenai pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak

d. Hambatan

Adanya keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh lembaga layanan dan kelompok masyarakat agar upaya pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak dapat dikomunikasikan dan diinformasikan secara optimal

e. Tindaklanjut:

Penguatan jejaring antar lembaga layanan dan kelompok masyarakat di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pemanfaatan teknologi secara daring untuk mengoptimalkan jangkauan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara lebih luas.

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebahai berikut:

**Tabel. 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.657.000	60.650.760	99,99
2	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	575.685.000	575.678.000	99,99

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	20.746.000	20.746.000	100
	<b>TOTAL</b>	<b>657.088.000</b>	<b>657.074.760</b>	<b>99,99</b>

Berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp 13.240,-

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Baik**. Hal ini dikarenakan pada Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi sebagaimana tersaji pada tabel 2.2b merupakan kegiatan yang dilakukan sekali dalam 1 tahun. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp.13.240,-.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi serta penguatan koordinasi, jejaring dan kemitraan secara lintas sektor di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mendukung capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
2. Penguatan kapasitas layanan pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga dengan melibatkan stakeholder lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Peningkatan pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan melalui penguatan peran Forum Anak di berbagai tingkatan.

Semarang, 12 Januari 2026

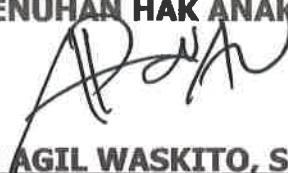
Mengetahui  
**Pt.KEPALA BIDANG PEMENUHAN  
HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**DRS. YULI ARSIANTO, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 004

**SUB KOORDINATOR  
PEMENUHAN HAK ANAK**



**ARDIAN AGIL WASKITO, S.Psi**

Penata Tk. I  
NIP. 19880730 201101 1 005



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR**  
**KELUARGA BERENCANA DAN ADVOKASI,**  
**KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	17
3.3 Inovasi .....	17
3.4 Penghargaan .....	17
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	18
B Rekomendasi .....	18

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 .....	11
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD ..	12
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....	12
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	14
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .....	15
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan .....	17

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

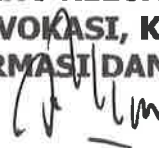
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA  
DAN ADVOKASI, KOMUNIKASI  
INFORMASI DAN EDUKASI**



**Drs. YULI ARSIANTO, M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680702 199803 1 00

#### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Advokasi Dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

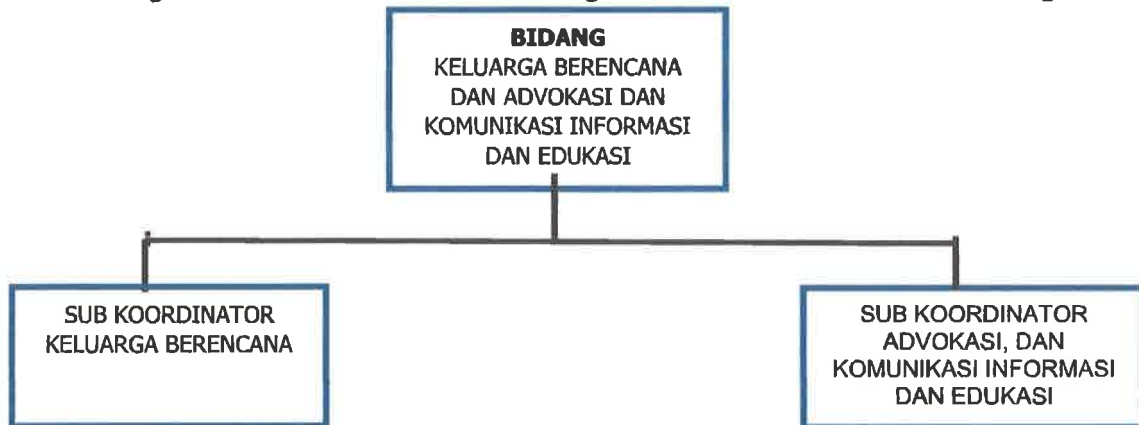
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Berencana;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.1 Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan bahwa Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

### **Gambar 1.1 Struktur Organisasi**

Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Susunan Organisasi Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Keluarga Berencana;
- b. Sub Koordinator Advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;

Seksi – seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas.

### **1.3 Isu Strategis**

1. Rasio PLKB dengan jumlah PUS dan Desa belum proporsional;
2. Kurangnya kualitas SDM Kader KB dalam memberikan motivasi dan sosialisasi;
3. Kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mendukung layanan KB Pasca Persalinan;
4. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program KB;
5. Minimnya peran serta pria dalam program KB.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup 1 (satu) Program yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana, beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.

Adapun PK Perubahan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Meningkatkan peran dan kualitas SDM kader KB;
2. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi kepada Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja KB;
3. Sosialisasi dan publikasi program Bangga Kencana dan KB;
4. Upaya peningkatan peran Pria dalam program KB.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Modern Unmetneed	69,47%	65,52%	94,31%	66,4%
			7,78%	6,04%	128,81%	9,8%

Capaian mCPR tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan mCPR disebabkan oleh Pasangan Usia Subur PUS mengalami kenaikan sedangkan Peserta Aktif mengalami penurunan

**Tabel 3.1.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Modern	69,47%	65,52%	94,31%	Baik	BKKBN

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		Unmetneed	7,78%	6,04%	128,81%	Istimewa	BKKBN

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	-	-	-	65,58%	69,46%	105,92%	69,47%	65,52%	94,31%
		Unmetneed	12,76%	8,60%	148,37%	10%	7,79%	128,37%	7,78%	6,04%	128,81%

**Tabel 3.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	69,46%	66,4%	104,61%
		Unmetneed	7,79%	9,8%	125,8%

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Program Pembinaan Keluarga	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	69,47%	65,52%	94,31%	Masih rendahnya jumlah Penyuluh	mengoptimalkan kinerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Berencana (KB)					Keluarga Berencana (PLKB) yang mampu Pasangan Usia Subur (PUS) di setiap desa/kelurahan	(PPKBD) untuk mendukung peran dan fungsi PLKB melalui Peningkatan Kapasitas PPKBD
		Unmetneed	7,78%	6,04%	128,81%	Masifnya penggerakan bersama mitra dan kader keluarga	

**Tabel 3.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja		Anggaran			Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		%Capaian
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	69,47%	65,52%	94,31%	139.961.000	139.878.420	99,94	0,05
		7,78%	6,04%	128,81%	339.465.000	339.356.004	99,97	0,03

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	94,31%	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	103,27	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kearifan Budaya Lokal			
		Unmetneed	128,81%	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	175,6	Menunjang

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Program Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	479.426.000	479.234.424	99,96
	<b>TOTAL</b>	<b>479.426.000</b>	<b>479.234.424</b>	<b>99,96</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### 3.3. Inovasi

#### 1. CETING KETAN

Inovasi Ceting Ketang (cegah stunting kelompok rentan) dilakukan untuk mendukung penurunan stunting melalui penggerakan pelayanan KB bagi kelompok rentan (Kelompok 4 Terlalu, Miskin, Pengangguran Gelandangan Orang Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa). Sehingga kedepannya, pengendalian kelahiran dari kelompok rentan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang berkualitas. Gerakan yang mengintegrasikan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dengan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan yang Peduli Anak (Kampung KBRPPA), sehingga mudah untuk diimplementasikan dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.

### 3.4. Penghargaan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Kualitas Data Terbaik Tingkat Provinsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dengan peringkat terbaik III dari 38 provinsi di Indonesia.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimewa**. Hal ini dikarenakan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 191.576.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kader KB;
2. Meningkatkan upaya penggerakan KB di masyarakat, terutama KB MKJP;
3. Mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung program KB di Jawa Tengah;
4. Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja terkait dalam mendukung program Bangga Kencana di Jawa Tengah.

Semarang, 12 Januari 2025

Mengetahui

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA BIDANG KELUARGA  
BERENCANA DAN ADVOKASI DAN  
KOMUNIKASI INFORMASI DAN  
EDUKASI**

**Drs. YULI ARSIANTO, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680702 199803 1 00



**LAPORAN KINERJA  
SUB KOORDINATOR KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	8
2.3.1 Capaian Kinerja.....	8
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	14
2.4 Kinerja Keuangan.....	15
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	17
B Rekomendasi .....	17

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Berencana Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Keluarga Berencana Tahun 2025 .....	12
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Keluarga Berencana Tahun 2025 .....	16

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah .....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pengendalian penduduk sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
KELUARGA BERENCANA**



**DWI GUSTIANI SARI, SH, MH**

Pembina

NIP. 19760828 199703 2 001

## BAB I PENDAHULUAN

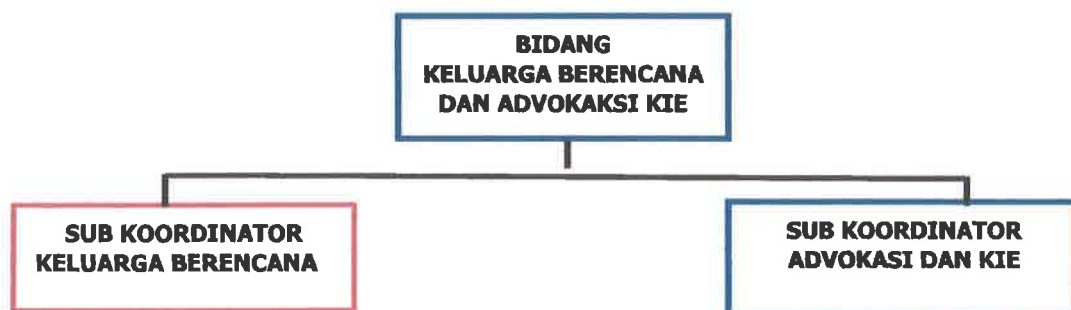
### 1.1 Tugas Jabatan

Seksi Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Penduduk;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
4. menyiapkan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tingkat Daerah;
5. menyiapkan bahan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk tingkat Daerah;
6. menyiapkan bahan Analisa dampak kependudukan tingkat Daerah.

### 1.2 Struktur Jabatan

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Keluarga Berencana  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 Tahun 2023

### **1.3 Isu Strategis**

1. Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah desa yang didampingi tidak proporsional;
3. Kurangnya kapasitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - a. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal.
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.
  - a. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP;
3. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas PPKBD;
4. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader KB dalam Program Bangga Kencana.

#### **2.3 Analisis Kinerja**

##### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Koordinator Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Keluarga Berencana**  
**Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya jumlah pengguna MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,5%	28,4%	103,27
	1. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan	Meningkatnya kepesertaan KB pada Pasangan Usia Subur	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak	10 Dok.	10 Dok.	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal			
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Meningkatnya kapasitas PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10%	17,56%	175,6
	1. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan	Meningkatnya peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan	2 Kelompok	2 Kelompok	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesertaan Ber-KB		Kesertaan Ber-KB			

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Keluarga Berencana**  
**Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,5%	27,49%	27,95%	28,33%	28,4%	103,27

2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10%	18,1%	17,02%	17,56%	17,56%	175,6%
---	--	---	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Berencana Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "Istimewa". Hal ini dikarenakan ketercapaian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan target perencanaannya. Ketercapaian ini didukung sinergitas kerja antara DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah serta mitra dan unsur pentahelix.

### 2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan

Pencapaian kegiatan Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP  
Formulasi: Pengguna KB MKJP dibagi peserta KB Aktif dikalikan 100 persen
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:
    - 1) Adanya kebijakan daerah di Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan program KB di masyarakat;
    - 2) Kemajuan akses informasi yang mendorong percepatan dan kemudahan media promosi bidang KB;
  - d. Hambatan:
    - 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan lebih banyak menggunakan KB Non MKJP;
    - 2) Pemahaman masyarakat yang melarang penggunaan alat kontrasepsi di beberapa daerah (adat istiadat);
    - 3) Kurang meratanya akses pelayanan dan informasi KB di masyarakat, terutama di wilayah khusus atau galciltas (tertinggal, terpencil dan terbatas).
  - e. Tindak lanjut:
    - 1) Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat dan kesadaran dalam program KB berupa stimulan uang harian kepada akseptor KB MKJP, terutama pengguna alat kontrasepsi IUD
    - 2) Melaksanakan penggerakan dan sosialisasi program KB melalui kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP yang dilakukan secara massal dan gratis pada momentum tertentu.
    - 3) Mengoptimalkan akses pelayanan dan informasi KB di wilayah khusus dengan pelaksanaan pelayanan KB di wilayah galciltas.
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:

- Meningkatnya kapasitas PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah
- b. Indikator Kegiatan:  
Meningkatnya kapasitas PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah  
Formulasi: Jumlah PPKBD yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah PPKBD di Kab/Kota yang capaian KB nya rendah dikalikan 100 persen
- c. Faktor yang mendukung keberhasilan:
- 1) Tingginya motivasi dan etos kerja PPKBD dalam melaksanakan pendampingan PUS dan penggerakan program KB di masyarakat;
  - 2) Organisasi Perkumpulan Kader KB Provinsi Jawa Tengah yang diakui secara hukum melalui Keputusan Kemenkumham RI tahun 2024 telah memperoleh dana hibah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 sehingga mampu melaksanakan kegiatan organisasi yang mendukung program KB;
  - 3) Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap kinerja PPKBD di sebagian besar Kabupaten/Kota
- d. Hambatan:
- 1) Banyaknya tugas yang dibebankan kepada PPKBD di luar program KB sehingga kinerja dalam penggerakan program KB kurang maksimal;
  - 2) Terbatasnya sarana penunjang dan pengetahuan teknologi dalam penginputan data hasil kerja PPKBD serta kurangnya pembaharuan ilmu maupun keterampilan yang berkaitan dengan tugasnya di lapangan;
  - 3) Belum meratanya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kinerja PPKBD di masing - masing Kabupaten/Kota
- e. Tindak lanjut:
- 1) Melaksanakan pembinaan dengan PPKBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PPKBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - 3) Melakukan reorganisasi pengurus Perkumpulan Kader KB Provinsi Jawa Tengah;
  - 4) Melaksanakan advokasi tentang kinerja dan apresiasi bagi PPKBD yang telah mendukung program KB di masyarakat

#### **2.4. Kinerja Keuangan**

Capaian kinerja keuangan Seksi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	442.530.000	442.401.424	99,97
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	36.896.000	36.833.000	99,83
	<b>Total</b>	<b>479.426.000</b>	<b>479.234.424</b>	<b>99,9</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Seksi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, yang artinya dapat mencapai target yang direncanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang dimiliki (man, money dan methods).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kegiatan dapat dikategorikan "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b diimplementasikan selaras dengan perencanaan yang telah dibuat dan terjaga kontinuitasnya diselaraskan dengan update issue terpenting di setiap focus dan lokus kegiatan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

#### **B. Rekomendasi**

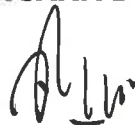
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan sub kegiatan pada Sub Koordinator Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun media promosi yang inovatif dan terkini tentang program KB;
2. Melaksanakan penjangkauan pelayanan KB di wilayah khusus atau galciltas sebagai upaya pemerataan akses pelayanan KB di masyarakat;
3. Menjaga hubungan kerjasama dengan stakeholder dan mitra terkait dalam penggerakan program KB di masyarakat.
4. Memaksimalkan kinerja PPKBD di masing – masing Kabupaten/Kota.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui

**KEPALA BIDANG KELUARGA  
BERENCANA DAN KIE**



**Drs. YULI ARSIANTO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP.1960119680702 199803 1004

**SUB KOORDINATOR KELUARGA  
BERENCANA**



**DWI GUSTIANI SARI, SH, MH**

Pembina

NIP. 19760828 199703 2 001



**LAPORAN KINERJA**  
**SUB KOORDINATOR ADVOKASI DAN KOMUNIKASI,**  
**INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	8
2.3.1 Capaian Kinerja.....	8
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	12
2.4 Kinerja Keuangan.....	12
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	14
B Rekomendasi .....	14

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Advokasi KIE Tahun 2025 .....	9
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Advokasi KIE Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Advokasi KIE Tahun 2025 .....	13

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah .....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Advokasi dan KIE pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Advokasi dan KIE pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pengendalian penduduk sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
ADVOKASI DAN KOMUNIKASI  
INFORMASI DAN EDUKASI**

  
**HAYATUN HUFUS, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760419 201101 2 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Tugas Jabatan**

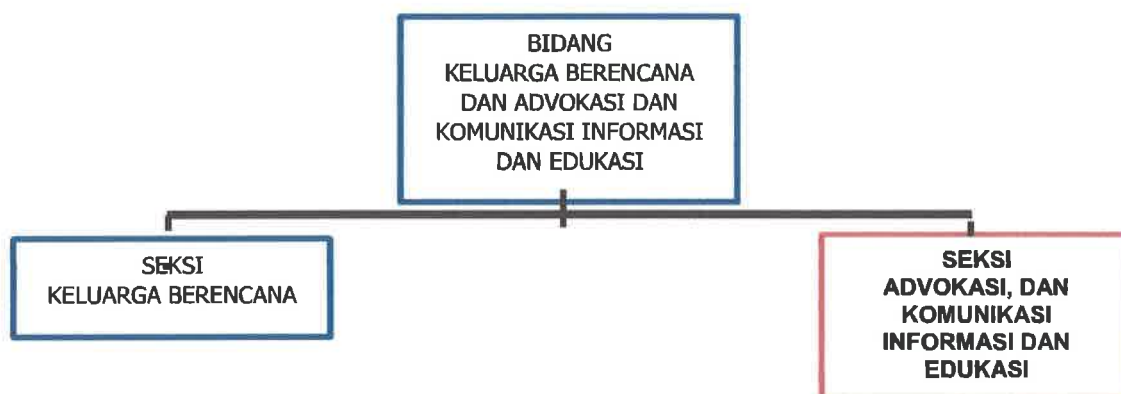
Seksi Advokasi dan KIE pada Bidang Keluarga Berencana dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi;
- 2) Menyiapkan bahan mengoordinasikan kebijakan teknis di Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi;
- 3) Menyiapkan bahan pengembangan desain program;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan dan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya local tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
- 5) Menyiapkan bahan penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tingkat daerah ;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 1.2 Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan bahwa Sub Koordinator Advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Advokasi dan KIE  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

## 1.3 Isu Strategis

1. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 10%;
2. Belum optimalnya komitmen dan advokasi terkait program Bangsa Kencana pada stakeholder dan mitra kerja di beberapa daerah;
3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang program Bangsa Kencana.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Advokasi dan KIE pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - a. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Advokasi dan KIE pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Menyiapkan bahan dan dokumen advokasi serta KIE program KB melalui mitra kerja.
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan advokasi dan KIE program KB bersama mitra kerja.
3. Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan KIE program KB melalui mitra kerja.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin bersama mitra kerja.

#### **2.3 Analisis Kinerja**

##### **2.3.1 Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Sub Koordinator Advokasi dan KIE pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Advokasi dan KIE**  
**Bidang Keluarga Berencana dan KIE**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya jumlah pengguna MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,5%	28,4%	103,27
	1. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Meningkatnya peserta penggerak advokasi dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	7 Kab/Kota	8 Kab/Kota	114,28

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Advokasi dan KIE**  
**Bidang Keluarga Berencana dan KIE**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,5%	27,49%	27,95%	28,33%	28,4 %	103,27

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "Istimewa". Hal ini dikarenakan ketercapaian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan target perencanaannya. Ketercapaian ini didukung sinergitas kerja antara DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah serta mitra dan unsur pentahelix.

### **2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian kegiatan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP  
Formulasi: Pengguna KB MKJP dibagi peserta KB Aktif dikalikan 100 persen
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:
    - 1) Dukungan mitra kerja (BKKBN, Muslimat NU, Aisyiyah, PKK, IBI, TNI) dalam sosialisasi dan edukasi.
    - 2) Peran mitra kerja dalam mobilisasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan KB di lapangan.
    - 3) Ketersediaan tenaga kesehatan terlatih untuk pemasangan MKJP.
    - 4) Adanya fasilitas kesehatan yang memadai dan akses mudah bagi masyarakat.
    - 5) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang efektif melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.
  - d. Hambatan:
    - 1) Masih adanya stigma atau mispersepsi tentang MKJP (misalnya dianggap berbahaya atau tidak sesuai syariat).
    - 2) Keterbatasan tenaga medis yang terlatih di daerah tertentu.
    - 3) Akses geografis yang sulit di wilayah terpencil.
    - 4) Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan
  - e. Tindak lanjut:
    - 1) Melibatkan mitra kerja dalam kegiatan bakti sosial KB untuk menjangkau daerah sulit.
    - 2) Monitoring dan evaluasi rutin bersama mitra kerja untuk mengukur capaian serta mengidentifikasi hambatan baru

### **2.4. Kinerja Keuangan**

Capaian kinerja keuangan Seksi Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Advokasi dan KIE**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	442.530.000	442.401.424	99,97
	<b>Total</b>	<b>442.530.000</b>	<b>442.401.424</b>	<b>99,97</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Seksi Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, yang artinya dapat mencapai target yang direncanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang dimiliki (man, money dan methods).

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sub kegiatan dapat dikategorikan "**Istimewa**". Hal ini dikarenakan pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b diimplementasikan selaras dengan perencanaan yang telah dibuat dan terjaga kontinuitasnya diselaraskan dengan update issue terpenting di setiap focus dan lokus kegiatan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Advokasi dan KIE Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Advokasi dan KIE Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan upaya penggerakan program Keluarga Berencana (KB) di masyarakat**, khususnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), melalui pemberian stimulan maupun kompensasi yang tepat sasaran.
2. **Mendorong pemberdayaan masyarakat**, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan (stakeholder), agar berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program KB di Jawa Tengah.
3. **Mengoptimalkan pemanfaatan platform media sosial** sebagai sarana advokasi dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kepada masyarakat secara luas, efektif, dan berkesinambungan.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui

**KEPALA BIDANG KELUARGA  
BERENCANA DAN KIE**



**Drs. YULI ARSIANTO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP.1960119680702 199803 1004

**SUB KOORDINATOR ADVOKASI DAN  
KIE**



**HAYATUN NUFUS, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19760419 201101 2 002



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA SEJAHTERA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	10
3.2 Realisasi Anggaran .....	23
3.3 Inovasi .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	24
B Rekomendasi .....	25

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 ..... 11
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ..... 12
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 ..... 13
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD .. 15
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan ..... 16
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran ..... 18
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang ..... 19
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan ..... 23

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA SEJAHTERA**

  
**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 200312 2 004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **1.2 Struktur Jabatan**

Struktur organisasi jabatan bahwa Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera  
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah



**Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023**

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
- b. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera;

Subagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

### 1.3 Isu Strategis

1. Masih ada Kabupaten/Kota diprovinsi Jawa Tengah yang belum menyesuaikan dokumen GDPK 3 Pilar menjadi Dokumen GDPK 5 Pilar;
2. Belum semua kampung KB yang sudah dibentuk dapat naik klasifikasinya menjadi mandiri dan berkelanjutan;
3. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten/Kota belum optimal.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup 2 (dua) Program yaitu Program Pengendalian Penduduk dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi;
3. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Adapun PK Perubahan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait dengan advokasi, fasilitasi dan sosialisasi kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
2. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyesuaian;
3. Mendorong penyusunan dokumen GDPK 5 pilar di daerah serta mendorong integrasinya kedalam dokumen perencanaan;
4. Penguatan komitmen dan advokasi implementasi GDPK 5 Pilar di Kabupaten/Kota;

5. Memastikan Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program Bangga Kencana.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57%	88,88%	155,93	62%
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32%	38,93%	121,66	36%

Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan memanfaatkan dokumen GDPK dalam pembangunan mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang hanya 75% atau 27 kab/kota menjadi 88,88% atau 32 kab/kota. Sedangkan Capaian kampung KB mandiri dan berkelanjutan yaitu 38,93% atau 3.334 desa di Jawa Tengah.

**Tabel 3.1.1.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57%	88,88%	155,93	Istimewa	BKKBN
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32%	38,93%	121,66	Istimewa	BKKBN

**Tabel 3.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	27.70%	61,11%	220,61%	61,11%	75%	122,7%	57%	88,8%	155,93%

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	-	-	-	28%	36,45 %	130,18 %	32%	38,93 %	121,66%

**Tabel 3.1.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	88,88%	62%	143,35%
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	38,93%	36%	108,14%

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Analisis Keberhasilan /Kegagalan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57%	88,88%	155,93	Tingginya komitmen kepala daerah terhadap isu kependudukan	
2	Program Pemberdayaan Dan	Persentase kampung KB	32%	38,93%	121,66	Masifnya Penguatan	

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	mandiri dan berkelanjutan				kelembagaan Kampung KB	

**Tabel 3.1.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1.	Program Pengendalian Penduduk	57%	88,88%	155,93	112.524.000	112.523.500	100	0
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	32%	38,93%	121,66	495.661.000	491.891.130	99,24	0,76

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	155,93	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	160	Menunjang
				Pemetaan Perkiraan	Jumlah dokumen	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	121,66	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	88.32	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Keluarga Sejahtera (KS)			Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Program Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengendalian Penduduk	112.524.000	112.523.500	100
2	Program Keluarga Sejahtera (KS)	495.661.000	491.891.130	99,24
	<b>Total</b>	<b>608.185.000</b>	<b>604.414.630</b>	<b>99,62</b>

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### 3.3. Inovasi

#### 1. GETAS RANTING

Gerakan yang mengintegrasikan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dengan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan yang Peduli Anak (Kampung KBRPPA), sehingga mudah untuk diimplementasikan dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.

## **BAB IV PENUTUP**

---

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Istimewa**. Hal ini dikarenakan pada Program Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,62%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 3.770.370. Adapun ketidakterserapan tersebut dikarenakan alokasi anggaran belanja narasumber yang tidak terserap 100%.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan lintas sektor terkait dalam keberhasilan program pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
2. Diperlukan monitoring dan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
3. Penetapan indikator kinerja individu yang mengacu pada indikator kinerja organisasi.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

**KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA SEJAHTERA**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004



**LAPORAN KINERJA**  
**SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	15
2.4 Kinerja Keuangan.....	16
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	17
B Rekomendasi .....	17

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Tahun 2025 .....	16

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Seksi Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pengendalian penduduk sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR  
PENGENDALIAN PENDUDUK**



**V.W. NOVITA DEWI, S.Sos, M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 19771112 200801 2 016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Tugas Jabatan**

Seksi Pengendalian Penduduk pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pengendalian Penduduk;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
4. menyiapkan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk tingkat Daerah;
5. menyiapkan bahan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk tingkat Daerah;
6. menyiapkan bahan Analisa dampak kependudukan tingkat Daerah.

#### **1.2 Struktur Jabatan**

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Pengendalian Penduduk  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 Tahun 2023

### **1.3 Isu Strategis**

1. Dokumen GDPK belum terimplementasi secara optimal karena masih dalam proses pengintegrasian dengan dokumen perencanaan daerah;
2. Belum optimalnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat Kampung KB, termasuk pengisian dan pemanfaatan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB;
3. Belum optimalnya pemahaman mengenai pentingnya integrasi Sekolah Siaga Kependudukan di kalangan pendidik dan peserta didik;
4. Belum optimalnya pemanfaatan pemetaan data kependudukan pada aplikasi SIPERINDU untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan.

**2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
  - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi;
  - b. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat;
  - c. Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain;
  - d. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.
  - a. Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

**2.2 Rencana Aksi**

1. Pendampingan penguatan komitmen Kabupaten/Kota untuk pengintegrasian dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerahnya serta mendorong Kabupaten/Kota untuk penyusunan PJKP dan Renaksi sebagai dokumen operasionalisasinya;
2. Pendampingan peningkatan kualitas Kampung KB termasuk pembinaan pengisian Rumah Data Kependudukan di Kampung KB;

3. Pendampingan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA/MA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Mendorong pemanfaatan data kependudukan di aplikasi SIPERINDU sebagai dasar pembuatan kebijakan pada OPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

## 2.3 Analisis Kinerja

### 2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling*. Predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

Adapun capaian kinerja Sub Koordinator Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2.a dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Pengendalian Penduduk**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya pemda yang mendapatkan advokasi pemanfaatan GDPK	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	20 kab/kota	32 kab/kota	160
	1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Kependudukan,	Meningkatnya pemahaman peserta dalam penyusunan GDPK 5 Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 dokumen	2 dokumen	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					
	2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan GDPK	Jumlah Penyusunan Dokumen dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2dokumen	2 dokumen	100
	3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola	Meningkatkan pemahaman siswa SMA-MA tentang pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kegiatan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Kelompok Kegiatan Masyarakat					
	4. Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 kab/kota	1 kab/kota	100
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah dokumen pelaksanaan pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dokumen	1 dokumen	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Adanya dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	1 dokumen	1 dokumen	100

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Pengendalian Penduduk**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	20 kab/kota	30 kab/kota	32 kab/kota	32 kab/kota	160

2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100
---	--	---	-----------	-----------	---	---	-----

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "Baik". Hal ini dikarenakan ketercapaian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan target perencanaannya. Ketercapaian ini didukung sinergitas kerja antara DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah serta OPD KB Kabupaten/Kota dan mitra dari unsur pentahelix (Perguruan Tinggi/ Akademisi, LSM, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Pemerintah).

### 2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan

Pencapaian kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya pemda yang mendapatkan advokasi pemanfaatan GDPK
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:  
Dasar hukum kegiatan yakni Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK; Kerjasama lintas sektor dan stakeholders karena GDPK mencakup semua bidang pembangunan.
  - d. Hambatan:  
Ketersediaan data untuk mendukung penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Rencana Aksi sebagai dokumen operasionalisasi/ tindak lanjut dari Dokumen GDPK; Sinkronisasi data dan dokumen lintas sektor.
  - e. Tindak lanjut:  
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)/ Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya jumlah dokumen pelaksanaan pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - c. Faktor yang mendukung keberhasilan:  
Tersedianya aplikasi dari BKKBN Pusat yakni SIPERINDU sebagai dashboard Data Kependudukan
  - d. Hambatan:  
Belum semua data kependudukan yang tersedia di aplikasi SIPERINDU update dan dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan kebijakan.
  - e. Tindak lanjut:

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	108.884.000	108.883.500	100
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3.640.000	3.640.000	100
	<b>Total</b>	<b>112.524.000</b>	<b>112.523.500</b>	<b>100</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik, yang artinya dapat mencapai target yang direncanakan dengan menggunakan secara optimal sumber daya yang dimiliki (man, money dan methods).

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sub kegiatan dapat dikategorikan "**Baik**". Hal ini dikarenakan pada dua Kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b diimplementasikan selaras dengan perencanaan yang telah dibuat dan terjaga kontinuitasnya diselaraskan dengan update issue terpenting di setiap focus dan lokus kegiatan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendampingan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen PJKP dan Renaksi dan mengintegrasikannya dalam Dokumen Perencanaan Daerahnya;
2. Optimalisasi pendampingan Kabupaten/Kota untuk implementasi Kampung KB yang sudah terbentuk agar dapat meningkat klasifikasinya menjadi mandiri dan berkelanjutan;
3. Optimalisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah;
4. Optimalisasi sosialisasi data kependudukan di SIPERINDU di lingkungan Pemprov Jateng.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
SEJAHTERA**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004

**SUB KOORDINATOR  
PENGENDALIAN PENDUDUK**



**V.W. NOVITA DEWI, S.Sos, M.Si**

Penata Tingkat I  
NIP. 19771112 200801 2 016



**LAPORAN KINERJA**  
**SUB KOORDINATOR KELUARGA SEJAHTERA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	17
2.4 Kinerja Keuangan.....	
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	20
B Rekomendasi .....	20

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Tahun 2025 .....	17

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.....	7

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sub Koordinator Keluarga Sejahtera pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Seksi Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di seksi Keluarga Sejahtera sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**SUB KOORDINATOR KELUARGA SEJAHTERA**



**NUR IDHA ARYANTI S.KM, MM**

Pembina

NIP. 19830106 200604 2 005

## BAB I PENDAHULUAN

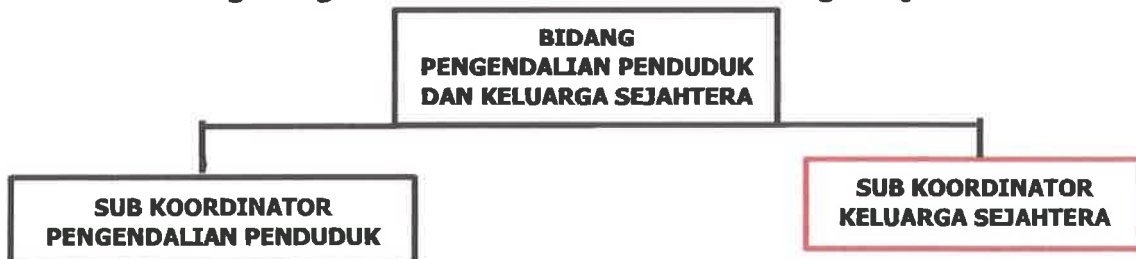
### 1.1 Tugas Jabatan

Seksi Keluarga Sejahtera pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Keluarga Sejahtera;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera;
4. menyiapkan bahan advokasi bina keluarga balita, ketahanan remaja, bina keluarga lanjut usia dan rentan tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/kota;
5. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
6. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Sejahtera; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2 Struktur Jabatan

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Seksi Keluarga Sejahtera  
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

### **1.3 Isu Strategis**

1. Masih rendahnya keaktifan peran kader tribina (BKR, BKB dan BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga;
2. Masih rendahnya kapasitas Kader Satyagraha di Kecamatan.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan beberapa sub kegiatan, diantaranya :

1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB;
  - b. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas;
  - b. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Adapun Perjanjian Perubahan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

1. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas
2. Peningkatan kapasitas Kader Satyagraha di Kecamatan;
3. Penguatan forum genre melalui PIK-Remaja di Kecamatan;

#### 4. Peningkatan Ketahanan ekonomi Keluarga

### 2.3 Analisis Kinerja

#### 2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Koordinator Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Istimewa : > 100%;
- b. Baik : 80,01% - 100%;
- c. Butuh Perbaikan : 60,01% - 80%;
- d. Kurang : 20,01% - 60%;
- e. Sangat Kurang : ≤ 20%

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Sub Koordinator Keluarga Sejahtera**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	17,7	20,04	88,32
	1. Fasilitas Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Konseling-	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 kelompok	1 kelompok	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Remaja (PIK-R) di Kampung KB					
	2. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Meningkatnya pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja aktif	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3 Kab/kota	3 Kab/kota	100
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Ketahanan dan	Anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30	30	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Kesejahteraan Keluarga					
	1. Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Berkeadilan	Terlaksananya Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Berkeadilan	2 Kab/kota	2 Kab/kota	100
	2. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	<p>dan kabupaten/kota</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan</p>	<p>Meningkatnya kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan program ketahanan keluarga</p>	<p>Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p>	<p>2 kelompok</p>	<p>2 kelompok</p>	<p>100</p>

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					

**Tabel 2.2b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Sub Koordinator Keluarga Sejahtera**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian %
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	17,7	13,7	13,7	13,7	20,04	88,32

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian %
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
2	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30	0	0	0	30	100

Berdasarkan tabel 2.2.b tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah "Baik". Hal ini dikarenakan ketercapaian program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dan tepat waktu.

### **2.3.2 Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Seksi Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan.
  - a. Sasaran Strategis Kegiatan:  
Meningkatnya kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan
  - b. Indikator Kegiatan:  
ASFR (Age Specific Fertility Rate).  
Formulasi: Jumlah angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun dibagi jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun dikalikan 1000
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:
    - 1) Kader Tribina berada di hampir semua desa di Jawa Tengah
    - 2) Kelompok PIK Remaja berada di semua kecamatan di Provinsi Jawa Tengah
  - d. Hambatan:
    - 1) Kapasitas kader Bina Ketahanan Keluarga dan PIK Remaja yang masih rendah
    - 2) Gerakan Pengelola PIK Remaja belum masiv d semua kelompok remaja
    - 3) Sasaran kelompok Bina Ketahanana keluarga dan PIK Remaja yang tidak aktif dalam kelompok
  - e. Tindak lanjut:
    - 1) Melakukan peningkatan kapasitas kader Bina Ketahanan keluarga dan PIK Remaja
    - 2) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - a. Sasaran Strategis Kegiatan:  
Anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha
  - b. Indikator Kegiatan:

Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha.

Formulasi: Jumlah anggota UPPKA yang menjadi wirausaha dibagi anggota UPPKA yang telah difasilitasi pemberdayaan ekonomi dikalikan 100 persen

c. Faktor Yang mendukung keberhasilan:

- 1) Adanya sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
- 2) Adanya sumber daya manusia yang bisa dilatih untuk meningkatkan pendapatan keluarga

e. Hambatan:

- 1) Kurangnya jiwa wirausaha di masyarakat
- 2) Kurangnya modal
- 3) Kurangnya pemasaran

f. Tindak lanjut:

- 1) Melakukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat
- 2) Melakukan upaya pendampingan berkelanjutan pada kelompok yang sudah dilatih

## 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan,**  
**Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60.520.000	60.518.370	100
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	435.141.000	431.372.760	99,13

Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
<b>TOTAL</b>	<b>495.661.000</b>	<b>491.891.130</b>	<b>99,24</b>

Berdasarkan table 2.4 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan kegiatan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 3.769.870,-.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran sub kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sub kegiatan dapat dikategorikan "Baik". Hal ini dikarenakan pada Program Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Dan berdasarkan tabel 2.4, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Seksi Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Keluarga Sejahtera Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan ekonomi Keluarga
2. Penguatan Ketahanan keluarga ;
3. Peningkatan kapasitas Kader Satyagraha di Kecamatan;
4. Peningkatan Akses terhadap Layanan Dasar Keluarga.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**KEPALA BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA SEJAHTERA**



**FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710919 200312 2 004

**SUB KOORDINATOR  
KELUARGA SEJAHTERA**



**NUR IDHA ARYANTI S.KM, MM**

Pembina  
NIP. 19830106 200604 2 005



**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	9
3.2 Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	22
B Rekomendasi .....	22

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	11
Tabel 3.1.3	Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025 .....	12
Tabel 3.1.4	Realisasi Capaian Target Kinerja dengan Target RPD ..	14
Tabel 3.1.5	Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....	15
Tabel 3.1.6	Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran .....	16
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .....	17
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Keuangan .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi UPTD PPA.....	Halaman 7
------------	-----------------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam Kepala UPTD PPA sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA UPTD PPA**



**EKA SUPRATI, ST, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730120 199803 2 004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

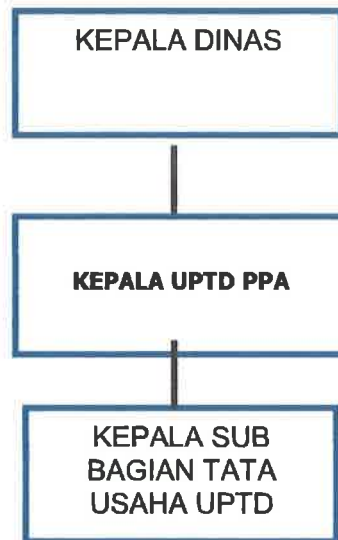
Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penjangkauan korban;
2. pelaksanaan pengelolaan kasus;
3. pelaksanaan pelaksanaan penampungan sementara;
4. pelaksanaan mediasi;
5. pelayanan pengaduan masyarakat;
6. pelaksanaan pendampingan korban;
7. pelaksanaan penatausahaan di lingkungan UPTD; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### **1.2 Struktur Jabatan**

Struktur organisasi jabatan bahwa Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Kepala UPTD PPA**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

### **1.3 Isu Strategis**

1. Belum optimalnya pelayanan Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2025 mencakup 3 (tiga) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak, beberapa sasaran kegiatan, diantaranya :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
7. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Adapun PK Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

#### **2.2 Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan perempuan, anak, disabilitas melalui bantuan hukum bagi disabilitas, perempuan dan anak dengan lokus Kecamatan;
2. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat tepat waktu dan semakin berkualitas.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	> 100 %	Istimewa
2	80,01 % - 100%	Baik
3	60,01 % - 80 %	Butuh Perbaikan
4	20,01 % - 60%	Kurang
5	≤ 20 %	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1.1.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kepegawaian, keuangan dan perangkat daerah tingkat umum,	90%	90%	100%	90%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	100%	100%	100%

**Tabel 3.1.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan kepegawaian, keuangan dan perangkat daerah tingkat umum, dan perangkat daerah	90%	90%	100%	Baik	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	Baik	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	100%	100%	Baik	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 3.1.1.3**  
**Realisasi Capaian Program Tahun 2023-2025**

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

No	Program	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

**Tabel 3.1.1.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja dengan target RPD**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target Akhir 2026</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	100%	100%

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja Program dengan Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Analisis Keberhasilan /Kegagalan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	90%	100%		
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%		
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	100%	100%		

**Tabel 3.1.6**  
**Capaian Kinerja dengan Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Program	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	90%	90%	100%	535.029.000	533.905.116	99,79	0,21
2	Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	100%	144.304.000	129.606.400	89,81	10,19
3	Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100%	154.299.000	141.832.274	91,92	8,08

**Tabel 3.1.7**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang**

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					sesuai standar layanan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					daerah yang disusun		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	Menunjang
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat	100	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan komprehensif		
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100	Menunjang

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja keuangan Program Kepala UPTD PPA Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Keuangan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	535.029.000	533.905.116	99,79
2	Program Perlindungan Perempuan	144.304.000	129.606.400	89,81
3	Program Perlindungan Khusus Anak	154.299.000	141.832.274	91,92

Berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam kategori **Baik**. Hal ini dikarenakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dengan laporan setiap triwulan. Dan berdasarkan tabel 3.2.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 28.288.210 atau sebesar 3,39%. Adapun ketidakterserapan tersebut adalah anggaran DAK-NF PPPA Boppa Pelayanan karena penyerapan anggaran menyesuaikan kebutuhan korban.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang terintegrasi sampai pada level kecamatan.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660517 199008 2 001

**KEPALA UPTD PPA**



**EKA SUPRAPTI, ST, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730120 199803 2 004



**LAPORAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**  
**UPTD PPA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Jabatan.....	6
1.2 Struktur Jabatan .....	6
1.3 Isu Strategis .....	7
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN</b>	
2.1 Perjanjian Kinerja .....	8
2.2 Rencana Aksi .....	9
2.3 Analisis Kinerja .....	9
2.3.1 Capaian Kinerja.....	9
2.3.2 Analisis Pencapaian Program.....	18
2.4 Kinerja Keuangan.....	21
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	24
B Rekomendasi .....	24

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPADinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.2a	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Tahun 2025 .....	10
Tabel 2.2b	Realisasi Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Tahun 2025 .....	15
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Tahun 2025 .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	Halaman 7
------------	---------------------------	--------------

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja program kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Semarang, 12 Januari 2026

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPTD PPA**



**RIDHA SETYASIH, M.Psi**

Penata Tingkat I

NIP. 19830110 201502 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

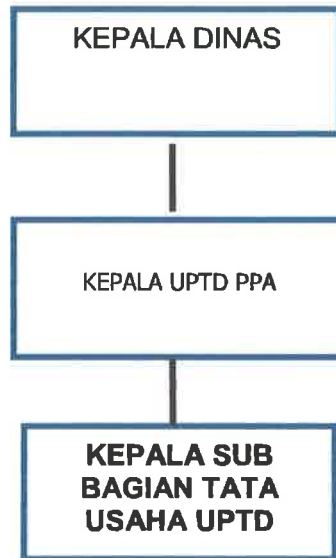
Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **1.2. Struktur Jabatan**

Struktur organisasi jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PPA**



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 15 tahun 2023

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**1.3. Isu Strategis**

1. Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah;
2. Layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang terintegrasi belum sampai pada level kecamatan.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

---

#### **2.1 Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada UPTD PPA pada tanggal 1 Oktober 2025 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
  - a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
  - a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
7. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

## b. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PPA sebagaimana terlampir.

### 2.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan perempuan, anak, disabilitas melalui bantuan hukum bagi disabilitas, perempuan dan anak dengan lokus Kecamatan;
2. Peningkatan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, OPD terkait serta Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat tepat waktu dan semakin berkualitas;
3. Melakukan pengawasan melekat pada staf dan memotivasi secara berkelanjutan agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

### 2.3 Analisis Kinerja

#### 2.3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi E-Controlling. Adapun predikat tingkat ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| a. Istimewa        | : > 100%         |
| b. Baik            | : 80,01% – 100%; |
| c. Butuh Perbaikan | : 60,01% – 80%;  |
| d. Kurang          | : 20,01% – 60%;  |
| e. Sangat Kurang   | : ≤ 20%          |

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2.a**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%	90%	100
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dok.	1 Dok.	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	90%	100
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	5 Paket	166,66
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100
	1. Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100
	1. Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa komunikasi,	Jumlah laporan penyediaan	1 Laporan	1 Laporan	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	5 Unit	166,66
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi	Terlaksananya	Jumlah sarana dan	1 Unit	3 Unit	300

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
6	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan korban kekerasan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	60 Orang	120
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani perempuan korban kekerasan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi	39 Orang	71 Orang	182,05

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
7	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya layanan korban kekerasan anak	Persentase anak korban kekerasan yang terpaparkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	50 Orang	25 Orang	50
	2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	35 Orang	144 Orang	411,42

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian (%)
			Provinsi			

**Tabel 2.2.b**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%	10%	35%	60%	90%	100
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	10%	35%	60%	90%	100

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit	0	0	0	1 Unit	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit	0	0	2 Unit	1 Unit	100
6	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
7	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel 2.2.a tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah "**Baik**". Hal ini dikarenakan telah tercapai jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi telah dibuat pada awal tahun.

### **2.3.2. Analisis Pencapaian Kegiatan**

Pencapaian Kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat di capai dengan upaya sebagaimana berikut:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan  
Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
  - b. Indikator Kegiatan  
Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan  
Formulasi: Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Administrasi kepegawaian perangkat daerah tercapai sesuai target.
  - d. Hambatan  
-
  - e. Tindaklanjut  
Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan  
Formulasi: Rata-rata ((Realisasi Sub Kegiatan/Target Sub Kegiatan) x 100%)
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Tercapainya administrasi umum perangkat daerah sesuai target.
  - d. Hambatan

- Terdapat harga salah satu peralatan dan perlengkapan kantor yang di bawah harga DPA.
- e. Tindaklanjut
 

Menyesuaikan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan harga di pasaran.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sasaran Strategi Kegiatan:
 

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
    - b. Indikator Kegiatan:
 

Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan

Formulasi: Jumlah total barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun
    - b. Faktor Yang mendukung keberhasilan
 

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai sesuai target.
    - c. Hambatan
 

-
    - d. Tindaklanjut
 

Memetakan kebutuhan penadaan barang yang diperlukan.
  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sasaran Strategi Kegiatan:
 

Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun
    - b. Indikator Kegiatan:
 

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun

Formulasi: Jumlah total laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun
    - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan
 

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai sesuai target.
    - d. Hambatan
 

-
    - e. Tindaklanjut
 

Meningkatkan penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Tersedianya Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
  - b. Indikator Kegiatan:  
Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan  
Formulasi: Jumlah total unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tercapai sesuai target.
  - d. Hambatan  
-
  - e. Tindaklanjut  
Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
6. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Meningkatnya layanan korban kekerasan perempuan
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif  
Formulasi: Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor terlayani dan mendapat layanan komprehensif
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Ketercapaian Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai target
  - d. Hambatan  
Menyesuaikan kebutuhan korban dan kurangnya pemahaman dan komitmen pendamping di Kabupaten/Kota ketika kasus dilanjutkan penanganannya oleh Kabupaten/Kota
  - e. Tindaklanjut  
Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota

7. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Sasaran Strategi Kegiatan:  
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi  
Meningkatnya layanan korban kekerasan anak
  - b. Indikator Kegiatan:  
Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif  
Formulasi: Jumlah anak korban kekerasan yang melapor terlayani dan mendapat layanan komprehensif dibagi jumlah anak korban kekerasan yang melapor dikalikan 100 persen
  - c. Faktor Yang mendukung keberhasilan  
Ketercapaian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah tercapai sesuai target
  - d. Hambatan  
Menyesuaikan kebutuhan korban dan kurangnya pemahaman dan komitmen pendamping di Kabupaten/Kota ketika kasus dilanjutkan penanganannya oleh Kabupaten/Kota
  - e. Tindaklanjut  
Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota

#### 2.4. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada aplikasi *E-Controlling* adalah sebahai berikut:

**Tabel. 2.4**  
**Capaian Kinerja Keuangan**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat	182.139.000	182.116.120	99,99

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah			
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.818.000	57.416.000	99,3
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000	1.500.000	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.796.000	254.475.096	99,87
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.776.000	38.397.900	99,02
6	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.304.000	129.606.400	89,81
7	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	154.299.000	141.832.274	91,92
	<b>Total</b>	<b>833.632.000</b>	<b>805.343.790</b>	<b>97,13</b>

Berdasarkan tabel 2.3.1 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,13%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 28.288.210,-. Adapun ketidakserapan tersebut dikarenakan adanya penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) perlindungan perempuan dan anak yang menyesuaikan kebutuhan korban kekerasan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja Kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah **Baik**. Hal ini dikarenakan pada 7 (tujuh) Kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.b merupakan kegiatan yang dilakukan rutin dalam 1 tahun. Dan berdasarkan tabel 2.3.1, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,13%. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sudah baik meskipun masih terdapat SILPA sebesar Rp. 28.288.210,-.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama baik stakeholder baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah ditingkat pusat, provinsi, Kab/Kota maupun antar provinsi untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Peningkatan Kapasitas SDM tenaga pada lembaga penyedia layanan;
3. Evaluasi terhadap perencanaan dan ketercapaian target.

Semarang, 12 Januari 2026

Mengetahui  
**KEPALA UPTD PPA**



**EKA SUPRAPTI, ST, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730120 199803 2 004

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPTD PPA**



**RIDHA SETYASIH, M.Psi**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19830110 201502 2 001